

**OPTIMALISASI PERAN APARAT PEMERINTAH DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF  
UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN DESA TANGGUH  
BENCANA DI DESA SOGINTI KECAMATAN PAGUAT  
KABUPATEN POHUWATO**

**Erman Rahim<sup>1</sup>, Fitran Amrain<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas hukum Universitas Negeri gorontalo

E-mail: [ermanrahim@gmail.com](mailto:ermanrahim@gmail.com)

ARTICLE INFO

**Article history:**

Received :06-10-2024

Revised :16-10-2024

Accepted: 21-10-2024

**Key words:**

Village; Disaster; Soginti

**DOI:10.62335**

ABSTRACT

*Soginti Village located in Paguat District, Paguat District, Pohuwato Regency in 2024 was affected by a natural disaster, namely a flood that harmed residents. In order to overcome this, proper handling is needed through the formation of village regulations. The purpose of this activity is to develop innovative work results that have utility value and benefits for the wider community, improve the quality of research and community service in the Gorontalo State University environment which is superior and competitive and ready to face global challenges. Implementation method. Implementation method The activity was carried out through the Real Work Lecture (KKN) program which is an activity based on Community Service in Soginti Village through mentoring, workshops and tree planting. The results of the implementation of this community service, namely KKN, have implemented 3 work programs, namely the creation of Disaster Resilient Village Regulations, Workshops on optimizing the role of government officials in the formation of participatory village regulations to support the strengthening of disaster resilient villages and Planting of living kitchens. The program implemented in Soginti Village received support from the government and community members so that it could run well.*

ABSTRAK

Desa Soginti yang terletak di Kecamatan Paguat, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato pada tahun 2024 terkena dampak bencana alam yaitu banjir yang merugikan warga. Demi mengatasi hal itu dibutuhkan penanganan yang tepat

melalui pembentukan peraturan desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan hasil karya inovasi yang memiliki nilai guna dan manfaat bagi masyarakat luas, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang bersifat unggul dan berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global. Metode pelaksanaan. metode pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan aktivitas berbasis pengabdian Masyarakat di desa Soginti melalui, pendampingan, workshop dan penanaman pohon. Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu KKN telah melaksanakan 3 program kerja yaitu pembuatan peraturan desa Tangguh bencana, Workshop optimalisasi peran aparat pemerintah dalam pembentukan desa peraturan desa yang partisipatif untuk mendukung penguatan desa tangguh bencana dan Penanaman dapur hidup. Program yang dilaksanakan di desa Soginti ini mendapat dukungan dari pemerintah dan warga Masyarakat sehingga bisa berjalan dengan baik.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara maritim berbentuk kepulauan di wilayah Benua Asia yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana. Berdasarkan kondisi geologis, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di gugusan gunung berapi atau Ring Of fire. Berdasarkan Laporan World Risk Report 2022 yang dirilis Bündnis Entwicklung Hilft dan IFHV of the RuhrUniversity Bochum menunjukkan, Indonesia menjadi negara paling rawan bencana ketiga di dunia. Skor Indeks Risiko Global (World Risk Index/WRI) Indonesia sebesar 41,46 poin pada 2021. Bencana merupakan peristiwa atau kejadian yang merugikan bagi kehidupan manusia. Menurut World Health Organization dalam Khambali, bencana dapat diartikan sebagai seluruh kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat Kesehatan atau pelayanan Kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respons dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Berdasarkan penyebab terjadinya, bencana dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosia.

Kecamatan paguat adalah salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Pohuwato. Paguat sendiri berada didaerah dekat laut. Kecamatan paguat rawan terjadi bencana alam., sebagaimana yang terjadi pada tahun 2024. Sebanyak 660 warga yang tersebar di 8 desa dan kelurahan di Kecamatan Paguat, diterjang banjir. Bencana hidrometeorologi yang dipicu hujan deras ini turut mengakibatkan 184 rumahterendam.

"Ya, banjir dari semalam yang terdampak ada 8 desa di Kecamatan Paguat dan 184 rumah terendam. Total (terdampak) 207 KK (kepala keluarga) dan 660 jiwa,"<sup>1</sup>

Kecamatan Paguat terdiri dari: Kelurahan Libuo Kelurahan Pentadu Kelurahan Siduan Desa Bumbulan Desa Bunuyo Desa Maleo Desa Sipayo Desa Soginti. Kkn ini dilaksanakan di desa Soginti. Adapun profil singkat desa Soginti sebagai berikut;

1. Letak Geografis : Desa Soginti berada di wilayah pesisir dan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perikanan.
2. Mata Pencaharian : Mayoritas penduduk Desa Soginti berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan. Pertanian di desa ini didominasi oleh tanaman padi, jagung, dan palawija, sementara perikanan berfokus pada tangkapan laut dan budidaya ikan.
3. Budaya dan Tradisi : Masyarakat Desa Soginti memiliki tradisi yang kuat dalam budaya lokal Gorontalo, seperti upacara adat dan kegiatan sosial yang sering diadakan dalam lingkup komunitas.
4. Fasilitas Umum : Terdapat fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar, fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas Pembantu, dan akses ke pasar di wilayah kecamatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Potensi Wisata : Desa ini memiliki potensi wisata alam, terutama di bidang ekowisata dan pesisir, meskipun belum terlalu dikenal secara luas. Pantai-pantai yang indah dan suasana pedesaan yang tenang menjadi daya tarik utama.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan desa terhadap bencana, optimalisasi peran aparat pemerintahan sangatlah krusial. Desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan memiliki potensi besar untuk beradaptasi dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan peraturan desa yang partisipatif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif.<sup>2</sup> Bencana alam yang kerap terjadi mengharuskan desa untuk memiliki strategi yang solid dalam menghadapinya. Melalui peraturan yang partisipatif, masyarakat dapat berkontribusi dalam merancang mekanisme mitigasi dan respons bencana. Aparat pemerintahan, sebagai penggerak utama, perlu memfasilitasi proses ini agar semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **a. Waktu dan Tempat**

Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN ini berlangsung Agustus sampai September 2024, berlokasi di Desa Soginti Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato diikuti oleh 14 orang mahasiswa dari Universitas negeri Gorontalo

### **b. Sasaran**

Pemerintah dan warga Masyarakat desa soginti.

---

<sup>1</sup> Kepala BPBD Kabupaten Pohuwato, Abdul Muthalib Dunggio

<sup>2</sup> Rahayu, M. D. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. [Skripsi] : FISIP UNILA.

### **c. Metode Pengabdian**

Pengabdian dilaksanakan dengan beberapa tahapan, meliputi observasi dan kunjungan ke lokasi guna mendapatkan informasi potensi yang dapat dikembangkan dan permasalahan yang harus diselesaikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam menjadi salah satu ancaman yang membahayakan kehidupan manusia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana dapat mengakibatkan banyak korban jiwa. Selain menimbulkan korban jiwa bencana juga dapat berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat seperti, kehilangan mata pencaharian dan harta benda. Dampak yang ditimbulkan bencana dapat diminimalisir dengan melakukan pencegahan bencana. Salah satu aspek penting dalam meminimalisir dampak dari bencana adalah dengan mitigasi bencana, mitigasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengambangan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.<sup>3</sup> Mitigasi bencana sebagai cara peningkatan partisipasi masyarakat terhadap bencana, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana, menyiapkan masyarakat agar tanggap bencana, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pengetahuan tanggap bencana.

Demi mencegah terjadinya bencana di Desa Soginti maka Universitas negeri Gorontalo melalui KKN Tematik bekerjasama dengan pemerintah desa melalui beberapa program inti. Adapun hasil Kerjasama tersebut sebagai berikut;

### **1. Pembentukan Peraturan Desa Tangguh Bencana**

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah: Pertama, penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kedua, penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Ketiga, penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga

---

<sup>3</sup> Andriyani, D., & Ajar, S. B. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Banaran Kabupaten Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Indonesian Journal of Environment and Disaster, 1(2)

mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada peristiwa bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial.<sup>4</sup>

Namun demikian permasalahan bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintahan saja tapi juga masyarakatnya harus secara aktif ikut serta sebagai bentuk partisipatif. Masyarakat yang tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri. Desa Tangguh merupakan program nasional yang diusulkan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagaimana Peraturan Kepala BNPB No. 01 Tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana, sebagai upaya mewujudkan Indonesia Tangguh. Program ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal PB. Karena masyarakat yang merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana di sekitarnya, maka masyarakat perlu dibekali dalam konteks pemberdayaan agar menjadi tangguh, bukan hanya siap menghadapi bencana tapi menjadi Tangguh bencana.<sup>5</sup>

Program Desa Tangguh Bencana dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat disertai pendampingan teknis dari pemerintah melalui kegiatan mitigasi non-struktural dan mitigasi struktural. Artinya, secara paralel perlu dilaksanakan penguatan kapasitas masyarakatnya dan penguatan kapasitas lingkungannya dengan mengoptimalkan kearifan lokal (local wisdom) agar masyarakat punya kemandirian dalam menghadapi bencana di tingkat desa. Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Desa dengan kultur masyarakat dapat lebih terpelihara dan dikembangkan dengan produktif untuk kehidupan dan penghidupan, di tingkat desa tempat dilaksanakannya berbagai program pemberdayaan masyarakat serta adanya kearifan lokal yang kuat yang harus diakomodasi dalam pengurangan resiko bencana.<sup>6</sup>

Guna mencegah desa dari bencana-bencana yang tidak diinginkan maka dibutuhkan regulasi yang memadai dan menyentuh langsung Masyarakat di desa, olehnya itu Solusi yang tepat adalah dibuatkan Peraturan Desa. Adapun program KKN yang dilaksanakan di Desa Soginti telah membantu pemerintah Desa dalam membuat Peraturan Desa tentang penguatan desa tangguh bencana.

Manfaat Peraturan Desa (Perdes): Menyediakan Kepastian Hukum: Memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Melibatkan

---

<sup>4</sup> Ginting, A. H., & Wijayanti, T. D. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara". TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 42-57.

<sup>5</sup> Handayani, R. (2011). Analisis Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana di Kabupaten Serang Provinsi Banten . In : Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011. Sultan Ageng University . Diakses pada 27 September 2019

<sup>6</sup> Kalangkahan, P. H., Areros, W. A., & Sampe, S. (2017). Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Kota Bitung. Jurnal Ilmiah Society, 1(24),

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desa. Mengatur Kehidupan Sosial: Menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat desa. Mendukung Pembangunan Desa: Mengarahkan dan mengatur berbagai aspek pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya Peraturan Desa (Perdes), pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta masyarakat desa dapat merasakan manfaat yang lebih nyata dari program-program pembangunan yang dijalankan. Khususnya Peraturan Desa Tangguh bencana ini sangat penting dalam mencegah terjadinya bencana di desa.<sup>7</sup>

## **2. Workshop optimalisasi peran aparat pemerintah dalam pembentukan desa peraturan desa yang partisipatif untuk mendukung penguatan desa tangguh bencana**

Sosialisasi Penanggulangan bencana serta Penanam bibit pohon pohon merupakan kegiatan inti dari mahasiswa KKN Tematik UNG 2024 di Desa Soginti. Desa Soginti merupakan salah satu kampung yang memiliki atau disebut istilah 4 kerajaan tersebut. kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 dan melibatkan mahasiswa, DPL, Aparat desa serta BPBD Puhuwato dalam proses kegiatan ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Kegiatan inti ini umumnya merupakan salah satu aspek penting dalam Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan. Penanaman bibit pohon juga membantu meningkatkan keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem lokal, Ini juga berkontribusi pada penghijauan desa, yang dapat meningkatkan kualitas udara dan lingkungan hidup, Mitigasi Dampak Bencana. Dengan menanam pohon di area rawan bencana, desa dapat mengurangi frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir dan longsor. Hal ini, merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan penanggulangan bencana pada desa.

## **3. Penanaman dapur hidup**

Pembuatan dapur hidup Di Desa Soginti merupakan salah satu program mahasiswa KKN tematik UNG yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat desa melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Dapur hidup adalah konsep bercocok tanam di halaman rumah dengan menanam berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti sayuran, rempah-rempah, dan tanaman obat. Program ini dimulai dengan memberikan penyuluhan kepada warga tentang pentingnya memiliki dapur hidup, serta teknik menanam yang tepat agar hasilnya optimal. Mahasiswa KKN juga membantu menyediakan bibit tanaman dan mengajarkan cara merawat tanaman agar bisa tumbuh dengan baik. Dengan adanya dapur hidup, diharapkan warga desa dapat mengurangi ketergantungan pada pasar, menghemat pengeluaran rumah tangga, serta mendukung pola hidup sehat dengan mengonsumsi sayuran segar yang ditanam sendiri. Selain untuk memenuhi kebutuhan dapur masyarakat juga diharapkan program ini bisa menghijaukan desa. Program ini berlangsung selama lima hari.

---

<sup>7</sup> Yurika Maharani, (2016). Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum, 1–5

## KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, dapat ditarik Kesimpulan bahwa; Pengabdian masyarakat dengan KKN telah melaksanakan 3 program kerja yaitu pembuatan peraturan desa Tangguh bencana, Workshop optimalisasi peran aparat pemerintah dalam pembentukan desa peraturan desa yang partisipatif untuk mendukung penguatan desa tangguh bencana dan Penanaman dapur hidup. Program yang dilaksanakan di desa Soginti ini mendapat dukungan dari pemerintah dan warga Masyarakat sehingga bisa berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, D., & Ajar, S. B. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Banaran Kabupaten Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 1(2)
- Ginting, A. H., & Wijayanti, T. D. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara". *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 42-57
- Handayani, R. (2011). Analisis Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana di Kabupaten Serang Provinsi Banten . In : *Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*. Sultan Ageng University . Diakses pada 27 September 2019
- Kalangkahan, P. H., Areros, W. A., & Sampe, S. (2017). Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Kota Bitung. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(24)
- Kepala BPBD Kabupaten Pohuwato, Abdul Muthalib Dunggio
- Rahayu, M. D. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. [Skripsi] : FISIP UNILA
- Yurika Maharani, (2016). Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum*, 1–5